

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (2024), pada tahun 2022 tercatat sekitar 12,8 juta penyandang disabilitas, yang mana 1,4 juta orang dari jumlah tersebut mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Di Provinsi Jawa Barat, data menunjukkan jumlah penyandang tunarungu pada tahun 2013-2015 tercatat 13.496 orang, tahun 2016-2018 tercatat 13.075 orang, pada tahun 2021 tercatat 4.262 orang, dan pada tahun 2022 tercatat 10.019 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024). Sementara itu, di Kota Tasikmalaya, jumlah penyandang tunarungu pada tahun 2020 sebanyak 556 orang, pada tahun 2021 sebanyak 437 orang, pada tahun 2022 sebanyak 273 orang, dan di tahun 2023 sebanyak 72 orang (Jabar Digital Service, 2024). Di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, terdapat 70 penyandang tunarungu (Jabar Digital, 2024).

Di Indonesia, kebijakan dan peraturan formal mengenai disabilitas telah berkembang untuk menjamin hak-hak disabilitas, termasuk mereka yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan hak-hak penyandang disabilitas yang telah disahkan melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2011, mengenai pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention On The Rights of Persons With Disabilities*), adapun tujuan disahkannya Undang-Undang ini untuk memastikan hak-hak dan kebebasan penyandang disabilitas dihormati dan dipenuhi secara setara, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan partisipasi sosial. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dan mendukung terciptanya lingkungan inklusif bagi semua (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Pada tahun 2016, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas,

Undang-Undang ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas, dengan penekanan pada inklusi sosial dan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016).

Selain itu di tingkat daerah banyak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Sampai saat ini, di tingkat provinsi tercatat ada 20 peraturan daerah, dan di tingkat kabupaten tercatat ada 17 peraturan daerah, serta di tingkat kota tercatat ada 16 peraturan daerah (Setiawan, 2021). Kebijakan dan peraturan formal yang ada di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih jauh dari harapan, masih banyak berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Indonesia, sebagai negara dengan populasi penduduk besar, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan inklusi sosial bagi seluruh warganya, termasuk bagi penyandang disabilitas tunarungu. Penyandang tunarungu sering menghadapi berbagai hambatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Kesulitan berkomunikasi menjadi masalah utama yang memperburuk marginalisasi mereka dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan penyandang tunarungu serta terbatasnya fasilitas yang inklusif (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025). Di Kota Tasikmalaya, tantangan ini semakin nyata, di mana penyandang tunarungu sering kali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan mereka memperburuk kondisi ini, menyebabkan marginalisasi dan meningkatkan perasaan terpisah dari kelompok sosial (Obech, 2024).

Penelitian oleh Siti Sarah Agusti (2019) yang berjudul "Aksi Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) terhadap Penyandang Disabilitas Rungu" menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh penyandang tunarungu memerlukan upaya penanggulangan yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti bagaimana peran pemuda di komunitas

besar di Jakarta memiliki kesadaran akan pentingnya hak-hak penyandang disabilitas dan ingin mendorong inklusi sosial. Peran pemuda dalam memperjuangkan kesetaraan hak penyandang tunarungu melalui advokasi aksesibilitas dan pengakuan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Upaya mereka mencakup penyediaan akses visual di transportasi umum, kehadiran juru bahasa isyarat (JBI) di televisi, serta keterlibatan dalam pengesahan regulasi terkait penyandang disabilitas. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan serta pengakuan formal dari pemerintah.

Dalam konteks ini, Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya hadir sebagai inisiatif yang menarik dan peduli terhadap tantangan yang dihadapi penyandang tunarungu. Komunitas pemuda ini didirikan pada 21 November 2021 untuk merespon keterbatasan komunikasi yang membuat penyandang tunarungu merasa terabaikan dan kesepian, bahkan di tengah keramaian, karena mereka kesulitan menemukan teman untuk berbicara dan merasa tidak ada yang peduli dengan kondisi mereka. Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya menyediakan ruang bagi penyandang tunarungu untuk belajar dan berinteraksi sosial. Salah satu program utama mereka adalah kelas Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), yang fokus pada peningkatan kemampuan komunikasi penyandang tunarungu dengan masyarakat. Program lain yakni Nongkrong Inklusif, yang mengajak penyandang disabilitas dan non-disabilitas berkumpul dan berinteraksi secara santai, dengan tujuan menghilangkan stigma dan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif (Obech, 2024). Dengan berbagai program sosial yang dijalankan, komunitas ini tidak hanya berperan dalam pemberdayaan penyandang tunarungu tetapi juga dalam upaya mengubah struktur sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk menghapus stigma, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta

memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas khususnya tunarungu di Kota Tasikmalaya (Obech, 2024).

Karena itu, Peneliti tertarik meneliti Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya karena upaya mereka yang unik dan inovatif dalam memberikan perhatian kepada penyandang tunarungu, kelompok yang sering terabaikan dalam masyarakat. Dengan mengusung program-program seperti kelas Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Nongkrong Inklusif, komunitas ini tidak hanya fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas, tetapi juga berusaha menciptakan ruang sosial yang inklusif dan menghilangkan stigma. Keberadaan mereka juga menunjukkan pentingnya peran komunitas dalam membangun kesadaran sosial dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya di tingkat lokal. Hadirnya komunitas ini membuka peluang untuk mempelajari bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mengacu pada fenomena yang terjadi penelitian ini akan ditinjau menggunakan teori model sosial disabilitas oleh Mike Oliver, yang menekankan bahwa hambatan utama bagi penyandang disabilitas justru berasal dari lingkungan sosial yang tidak inklusif. Dengan menggunakan model sosial disabilitas, penelitian ini menyoroti bagaimana perubahan dalam masyarakat, terutama melalui inisiatif komunitas pemuda, dapat meningkatkan keterlibatan penyandang tunarungu dalam kehidupan sosial mereka (Oliver, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini hendak menganalisis kontribusi yang diberikan oleh Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya sebagai komunitas pemuda dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang tunarungu di Tasikmalaya. Penelitian ini mengkaji program-program yang dilakukan oleh Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tunarungu, faktor pendukung dan penghambat dalam mendukung inklusi sosial penyandang tunarungu oleh komunitas pemuda Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya, serta solusi yang dapat

dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dan efek kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya terhadap inklusi sosial penyandang tunarungu di Kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini membahas kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya terhadap penciptaan inklusi sosial bagi penyandang tunarungu dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya dalam menciptakan inklusi sosial bagi penyandang tunarungu di Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya dalam menciptakan inklusi sosial penyandang tunarungu, serta bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
3. Bagaimana kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya memberikan efek terhadap inklusi sosial penyandang tunarungu di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan utama, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya dalam menciptakan inklusi sosial bagi penyandang tunarungu di Kota Tasikmalaya;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya dalam menciptakan

inklusi sosial penyandang tunarungu, serta mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut; dan

3. Untuk mengetahui efek dari kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya terhadap perwujudan inklusi sosial penyandang tunarungu di Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan, baik dari segi kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Adapun sebuah kegunaan ini secara akademik dan praktis:

1. Kegunaan Akademik

Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sosiologi, khususnya kajian tentang penyandang disabilitas, khususnya tunarungu, di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi penting bagi kajian serupa di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu orangtua, terutama orangtua penyandang disabilitas tunarungu, supaya dapat memahami pentingnya inklusi sosial dan memberikan informasi serta pelatihan untuk mendukung anak mereka berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Selanjutnya, diharapkan bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan inklusi sosial dan mengembangkan program pemberdayaan pemuda dalam mendukung penyandang disabilitas tunarungu. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas tunarungu. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemuda, sebagai agen perubahan dalam masyarakat, untuk menginisiasi program-program yang

memperkuat inklusi sosial, seperti pelatihan komunikasi bagi penyandang tunarungu dan pengembangan ruang publik yang lebih ramah disabilitas.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada model sosial disabilitas yang dikemukakan oleh Mike Oliver. Penelitian ini berangkat dari teori Model Sosial Disabilitas yang dikemukakan oleh Mike Oliver, yang menekankan bahwa disabilitas bukanlah masalah individu, melainkan hasil dari hambatan sosial, kultural, dan struktural dalam masyarakat. Model ini membedakan antara impairment (kondisi biologis) dan disability (konstruksi sosial yang membatasi). Dalam konteks ini, disabilitas bukanlah sesuatu yang harus "disembuhkan", tetapi justru masyarakatlah yang harus beradaptasi agar lebih inklusif terhadap keberagaman kemampuan manusia (Oliver, 2018).

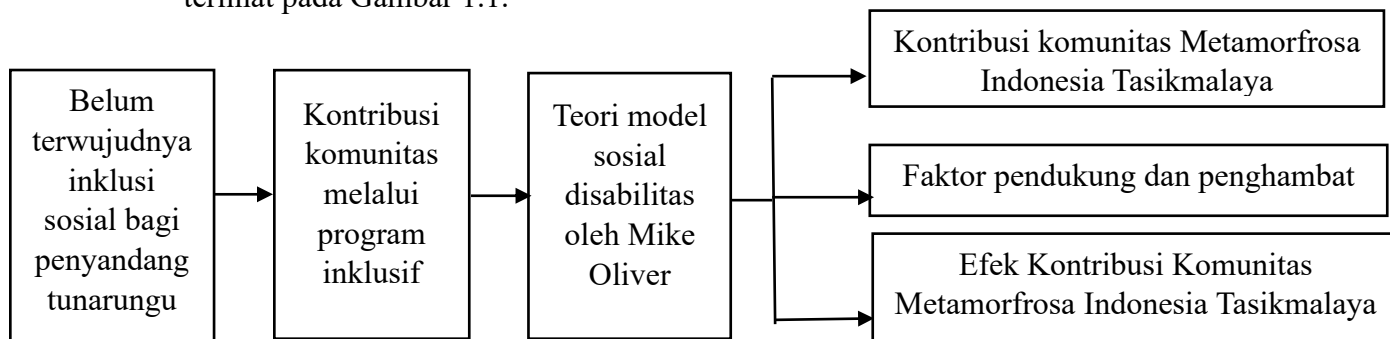
Konsep inklusi sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai proses meningkatkan partisipasi dan akses penuh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan struktural. Inklusi sosial mencakup pengakuan hak, akses terhadap layanan publik, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Dalam konteks penyandang tunarungu, hambatan komunikasi menjadi tantangan utama yang mempersulit keterlibatan mereka dalam lingkungan sosial, pendidikan, dan pekerjaan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Di sinilah pentingnya kontribusi komunitas, yang berperan sebagai aktor sosial yang mampu menciptakan perubahan melalui inisiatif lokal. Kontribusi yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk fisik atau materi, tetapi juga dalam bentuk pemikiran, gagasan, dan aksi kolektif untuk mendukung kesetaraan. Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya menjadi contoh konkret dari gerakan sosial yang peduli terhadap inklusi disabilitas, khususnya tunarungu, dengan berbagai program seperti Kelas BISINDO, Nongkrong Inklusif, dan OBAMA.

Dengan pendekatan berbasis komunitas, Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya menciptakan ruang-ruang sosial yang ramah disabilitas, membuka akses komunikasi dua arah, menghapus stigma, dan membangun solidaritas antar kelompok. Upaya mereka selaras dengan prinsip utama teori model sosial disabilitas, yakni bahwa solusi terhadap eksklusi sosial bukan terletak pada "memperbaiki" penyandang disabilitas, melainkan pada mengubah masyarakat agar lebih adil dan inklusif.

Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji tiga hal utama bagaimana kontribusi Komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya dalam menciptakan ruang sosial inklusif bagi penyandang tunarungu, dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses mewujudkan inklusi sosial tersebut, serta efek nyata dari program-program komunitas terhadap peningkatan partisipasi sosial penyandang tunarungu. Dengan teori model sosial disabilitas sebagai fondasi, penelitian ini menekankan bahwa transformasi sosial yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari komunitas lokal, khususnya generasi muda, dalam membongkar hambatan struktural yang selama ini menghalangi penyandang tunarungu untuk hidup setara.

Berdasarkan uraian di atas, berikut merupakan skema kerangka berpikir yang menghubungkan teori model sosial disabilitas dengan kontribusi nyata komunitas pemuda, khususnya Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya, dalam menciptakan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas tunarungu di Tasikmalaya. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir